



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA-022.11-0/2024**



DS:6566-1976-0580-4020

A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 022.11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI |
| 3. PAGU | : | Rp.196.457.340.000 |
| (SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM MILIAR EMPAT RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) | | |

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN



ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-022.11-0/2024**



DS:6566-1976-0580-4020

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 1 dari 3

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2. UNIT ORGANISASI	: 11	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
3. PAGU	: Rp.196.457.340.000	

(SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM MILIAR EMPAT RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 022.11.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	107.248.845
	: 022.11.WA	Program Dukungan Manajemen	89.208.495
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Terwujudnya Konektivitas Nasional	
	: 02	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	
	: 03	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	
	: 04	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	
	: 05	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	
	: 06	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Ramah Lingkungan	
	: 07	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	
	: 08	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
3. FUNGSI	: 04	EKONOMI	196.457.340
SUB FUNGSI	: 0408	TRANSPORTASI	196.457.340
4. PRIORITAS NASIONAL	: 05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5.764.294
NON PRIORITAS NASIONAL	:		190.693.046



DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-022.11-0/2024



DS:6566-1976-0580-4020

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 2 dari 3

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
022.11.GA	Program Infrastruktur Konektivitas		107.248.845
SP05	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi		
IKP01	Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi	Baik Indeks	
IKP02	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (tahun berjalan)	90 Persen	
IKP03	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2)	32 Persen	
6891	Formulasi Kebijakan Transportasi		107.248.845
01.01	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (tahun berjalan)	90 Persen	
01.02	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)	39 Persen	
01.03	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (tahun berjalan)	90 Persen	
01.04	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2)	32 Persen	
02.01	Perumusan Kebijakan Transportasi yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan	100 Persen	
022.11.WA	Program Dukungan Manajemen		89.208.495
SP02	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
4652	Pengelolaan Organisasi dan SDM Perumus Kebijakan		2.857.310
4653	Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan		85.616.903
4655	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Perumus Kebijakan		639.110



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-022.11-0/2024**



I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 3 dari 3

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
6892	Legislasi dan Litigasi Kebijakan		95.172

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Kebijakan Transportasi



Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si
197906291998021002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-022.11-0/2024



DS:6566-1976-0580-4020

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 1 dari 2

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2. UNIT ORGANISASI : 022.11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
3. PAGU : Rp.196.457.340.000
(SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM MILIAR EMPAT RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	022.11.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	KP	0	103.763.294	3.485.551	0	107.248.845	0
	01	DKI JAKARTA		0	103.763.294	3.485.551	0	107.248.845	0
	288752	SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI		0	23.634.758	0	0	23.634.758	0
	A00	RM		0	23.634.758	0	0	23.634.758	0
	288944	PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI		0	17.402.057	1.049.000	0	18.451.057	0
	A00	RM		0	17.402.057	1.049.000	0	18.451.057	0
	288951	PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA		0	19.778.942	1.876.681	0	21.655.623	0
	A00	RM		0	19.778.942	1.876.681	0	21.655.623	0
	414267	PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN		0	25.242.834	299.870	0	25.542.704	0
	A00	RM		0	25.242.834	299.870	0	25.542.704	0
	634171	PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI		0	17.704.703	260.000	0	17.964.703	0
	A00	RM		0	17.704.703	260.000	0	17.964.703	0
	022.11.WA	Program Dukungan Manajemen	KP	46.758.254	39.774.312	2.675.929	0	89.208.495	0
	01	DKI JAKARTA		46.758.254	39.774.312	2.675.929	0	89.208.495	0
	288752	SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI		46.758.254	24.751.888	2.675.929	0	74.186.071	0
	A00	RM		46.758.254	24.751.888	2.675.929	0	74.186.071	0
	288944	PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI		0	3.823.806	0	0	3.823.806	0
	A00	RM		0	3.823.806	0	0	3.823.806	0
	288951	PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA		0	3.566.395	0	0	3.566.395	0

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-022.11-0/2024
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER



DS:6566-1976-0580-4020

Halaman : 2 dari 2

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2. UNIT ORGANISASI : 022.11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
3. PAGU : Rp.196.457.340.000
(SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM MILIAR EMPAT RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	A00 RM			0	3.566.395	0	0	3.566.395	0
	414267 PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN		KP	0	3.984.364	0	0	3.984.364	0
	A00 RM			0	3.984.364	0	0	3.984.364	0
	634171 PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI		KP	0	3.647.859	0	0	3.647.859	0
	A00 RM			0	3.647.859	0	0	3.647.859	0
	TOTAL			46.758.254	143.537.606	6.161.480	0	196.457.340	0
	RM			46.758.254	143.537.606	6.161.480	0	196.457.340	0
	PENDAPATAN							0	

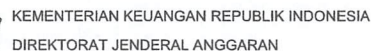
KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Kebijakan Transportasi



Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si
197906291998021002



III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

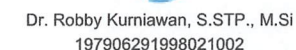


1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	:	022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2. UNIT ORGANISASI	:	022.11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
3. PAGU	:	Rp.196.457.340.000
(SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM MILIAR EMPAT RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)		

(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Kebijakan Transportasi





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 022.11.1.634171/2024**



DS:2641-9194-1475-0341

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(022)	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2. Unit Organisasi	:	(11)	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker	:	(634171)	PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI
Sebesar	:	Rp. 21.612.562.000	(DUA PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS DUA BELAS JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

04 EKONOMI
04.08 TRANSPORTASI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	21.612.562.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA IV	(133) Rp.	21.612.562.000
--------------------	-----------	----------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.11.1.634171/2024



DS:2641-9194-1475-0341

Satker : (634171) PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI

GA	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp.	17.964.703.000
GA.6891	Formulasi Kebijakan Transportasi	Rp.	17.964.703.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.647.859.000
WA.4653	Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan	Rp.	3.647.859.000